



Pengaruh keterbatasan sistem informasi dan otoritas pengambilan keputusan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

Sheila Gilby Sapulette¹, Franco Benony Limba²

^{1,2} Universitas Pattimura

²franco.limba@feb.unpatti.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 19 Maret 2022

Disetujui 23 Maret 2022

Diterbitkan 25 Maret 2022

Kata kunci:

Keterbatasan Sistem Informasi, Otoritas Penambilan Keputusan, Akuntabilitas Kinerja

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh keterbatasan sistem informasi dan otoritas pengambilan keputusan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan diuji menggunakan SPSS 24. Penelitian ini dilakukan pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku dengan sampel penelitian berjumlah 96 pegawai. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, sedangkan otoritas pengambilan keputusan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada nilai signifikansi sebesar 5%.

ABSTRACT

This study aims to empirically analyze the influence of information system limitations and decision making authority on performance accountability of local government agencies by using quantitative approach and is tested using SPSS 24. This research was conducted in 10 districts/ cities in Maluku province with the sample amounted to 96 employees. Sampling technique used purposive sampling method. The results of this study show that the information system limitations do not affect the performance accountability of local government, while the decision making authority affect the performance accountability of local government at the 5% significance level.

Keywords :

Information system limitations, decision making authority, performance accountability



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Implementasi sistem pengukuran kinerja pada pemerintah mulai dilakukan sejak ditandatangani Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 oleh Presiden B. J. Habibie. Pengukuran kinerja adalah proses mengawasi dan melaporkan tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi secara berkelanjutan (GAO, 2005b dikutip dalam Nurkhamid (2008). Pengimplementasian sistem pengukuran kinerja diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki kinerja mereka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, efisiensi, dan efektifitas layanan publik secara transparan, membantu alokasi sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan akuntabilitas public (Mardiasmo, 2021). Mahmudi (2010) dalam Nurkhamid (2008) menyatakan bahwa pengukuran kinerja memiliki kaitan yang erat dengan akuntabilitas. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor pendorong terciptanya akuntabilitas di sektor publik.

Akuntabilitas kinerja menurut Inpres nomor 7 Tahun 1999 merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) ini terangkum dalam sebuah laporan, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mencapai akuntabilitas kinerja (Akbar et al., 2015). Melalui LAKIP, kinerja pemerintah akan dinilai secara transparan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja (Nurkhamid, 2008). Aturan tentang LAKIP secara teknis terdapat dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) nomor

589/IX/6/Y/1999 yang kemudian direvisi menjadi Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Walaupun telah lama diamanatkan, pencapaian akuntabilitas kinerja masih terdapat banyak masalah, hal ini disebabkan karena heterogenitas institusi pemerintah dalam hal ukuran, aset, populasi, sumber daya manusia, kemampuan keuangan dan kemampuan manajerial yang menyebabkan perbedaan hasil akuntabilitas (Akbar et al., 2015). Selain itu, Primarisanti dan Akbar (2015) juga menyatakan bahwa dalam penyusunan LAKIP, fakta menunjukkan bahwa hanya beberapa institusi pemerintah yang mampu atau berhasil untuk menyiapkan laporan akuntabilitas mereka. Selain itu juga diperparah dengan adanya bias yang terjadi dalam pelaporan akuntabilitas (Solikin, 2005). Pemerintah lebih cenderung untuk melaporkan program dan/ atau kegiatan yang berhasil dibandingkan yang gagal (Nurkhamid, 2008).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi baik buruknya akuntabilitas kinerja suatu daerah. Pengaruhnya bisa berasal dari luar maupun dari dalam organisasi dalam daerah tersebut. Salah satunya terkait dengan sistem informasi yang digunakan. Teknologi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan sebuah organisasi dalam pengimplementasian suatu sistem informasi. Organisasi saat ini dituntut untuk memiliki sistem teknologi informasi yang tepat agar dapat mempermudah organisasi dalam memperoleh data tepat waktu dan akurat. Penggunaan sistem pengukuran kinerja untuk akuntabilitas dan mendukung pembuatan keputusan kemungkinan menjadi terbatas karena keterbatasan sistem informasi dan akan menghalangi para manajer untuk memperoleh data yang tepat waktu dan reliabel (Nurkhamid, 2008).

Otoritas pengambilan keputusan juga berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja organisasi daerah. Otoritas pengambilan keputusan merupakan suatu kondisi dimana seseorang mempunyai hak atau kuasa untuk mengambil keputusan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi (Cavalluzzo & Ittner, 2004). Mwitwa (2000) mengatakan bahwa terpusatnya otoritas pengambilan keputusan akan mengurangi tingkat akuntabilitas diantara anggota organisasi sektor publik yang akan menyebabkan timbulnya pengambilan keputusan tentang kinerja dan sumber daya yang tidak diinginkan yang mengarah pada penurunan kualitas pelayanan publik.

Data peringkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB tahun 2021, hanya Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah yang meraih peringkat B, sedangkan 9 Kabupaten/Kota lainnya berada pada peringkat CC, C dan D. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada masing-masing daerah masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Pada kategori tersebut, ukuran kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat, karena sebagian ukuran kinerja masih berupa keluaran kegiatan.

Penelitian ini akan dilakukan pada sebelas (11) kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Alasan yang mendasari penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Maluku adalah berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB untuk tahun 2020 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku berada pada nilai CC, C dan D atau dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku belum cukup baik. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja mereka, sehingga dengan adanya perbaikan dan peningkatan tersebut akan berpengaruh pada akuntabilitas kinerja mereka.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sebelas (11) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, yaitu: Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan dan Kepulauan Aru. Objek penelitian adalah dinas-dinas pada pemerintah kabupaten/kota. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling*, sampel dipilih berdasarkan kriteria/syarat tertentu yaitu pejabat minimal eselon empat (IV) pada masing-masing dinas. Kriteria tersebut untuk memastikan bahwa responden adalah pejabat yang telah atau pernah terlibat secara langsung dalam proses penyusunan perencanaan.

Level analisis pada penelitian ini berada pada tingkat organisasi yang diwakili oleh satu individu pada setiap dinas. Walaupun lebih baik jika level analisis pada tingkat organisasi diwakili oleh beberapa individu, akan tetapi dalam penelitian ini satu individu dapat dikatakan mampu mewakili organisasi. Hal ini disebabkan untuk kasus implementasi sistem pengukuran kinerja (SAKIP) di instansi pemerintah daerah (SKPD), individu yang terlibat hanya 2 orang yaitu kepala bagian program dan perencanaan atau bagian lain yang terlibat (bagian yang menangani SAKIP dan LAKIP di tiap SKPD berbeda) dan kepala SKPD (Sofyani & Akbar, 2013). Namun konteks penelitian di lapangan hanya memungkinkan untuk mendapat partisipasi dari satu informan saja di tiap SKPD, yaitu kepala dinas. Hal ini dikarenakan kepala dinas dapat mewakili keseluruhan organisasi, selain itu juga terlibat dalam pelaksanaan SAKIP dan pelaporan LAKIP.

Defenisi Operasional

- Keterbatasan Sistem Informasi (x1) didefinisikan sebagai keterbatasan kemampuan sistem informasi yang dimiliki suatu organisasi untuk memberikan data yang diperlukan secara valid, reliabel, dan tepat waktu. Instrumen pengukuran yang dipakai adalah instrumen penelitian milik Cavaluzzo dan Ittner (2004) yang digunakan oleh Sofyani (2013) dengan menggunakan skala likert yaitu 1-5 (1= Sangat tidak setuju – 5= Sangat setuju).
- Otoritas Pembuatan Keputusan (x2) didefinisikan sebagai otoritas pembuatan keputusan berdasarkan informasi kinerja yang dideligsasikan oleh organisasi kepada personilnya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Instrumen pengukuran yang dipakai adalah instrumen penelitian milik Cavaluzzo dan Ittner (2004) yang digunakan oleh Sofyani (2013) dengan menggunakan skala likert yaitu 1-5 (1= Sangat tidak setuju – 5= Sangat setuju).
- Akuntabilitas kinerja (Y) didefinisikan sebagai perasaan bertanggungjawab untuk mencapai target capaian dari suatu program/kegiatan/kebijakan. Instrumen pengukuran yang dipakai adalah instrumen penelitian milik Cavaluzzo dan Ittner (2004) yang digunakan oleh Sofyani (2013) dengan menggunakan skala likert yaitu 1-5 (1= Sangat tidak setuju – 5= Sangat setuju).

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan:

Y : Akuntabilitas Kinerja

a : konstanta

b1, b2 : koefisien regresi

x1 : keterbatasan sistem informasi

x2 : otoritas pengambilan keputusan

e : error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pengujian statistik pada hipotesis pertama menunjukan bahwa keterbatasan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dengan nilai signifikansi sebesar 0.438 lebih besar dari 0,05. Keterbatasan sistem informasi dalam penelitian ini terkait dengan terbatasnya sistem informasi yang dimiliki dalam suatu organisasi untuk memberikan data yang diperlukan secara valid, reliabel dan tepat waktu. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sofyani dan Akbar (2013). Tidak berpengaruhnya keterbatasan sistem informasi terhadap akuntabilitas kinerja, disebabkan karena sistem yang terintegrasi untuk pengumpulan data memang belum ada. Untuk mendapatkan data atau informasi kinerja untuk pengambilan keputusan maupun alat pertanggungjawaban yang dibutuhkan, masih dilakukan secara manual dan masih harus turun ke lapangan untuk mendapatkan data atau informasi tersebut

Pengaruh Otoritas Pengambilan Keputusan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pengujian statistik pada hipotesis pertama menunjukan bahwa keterbatasan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dengan nilai signifikansi sebesar 0.438 lebih besar dari 0,05. Otoritas pengambilan keputusan dalam penelitian ini terkait dengan otoritas pembuatan keputusan berdasarkan informasi kinerja yang didelegasikan oleh organisasi kepada personilnya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Nurkhamid (2008) dan Sofyan dan Akbar (2013), Primarsanti dan Akbar (2015). Hal ini disebabkan oleh adanya kebebasan yang diberikan oleh pimpinan pada tiap dinas untuk dapat menjalankan program dan kegiatan atau pengambilan keputusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing-masing bidang dengan tetap mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dan juga persetujuan dari pimpinan. Tidak adanya pembatasan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan akan mempengaruhi kinerja pegawai. Hal ini secara langsung akan berpengaruh pada pencapaian target yang telah ditetapkan, karena dengan adanya otoritas yang diberikan maka pegawai secara keseluruhan dapat berpartisipasi dan tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta persetujuan dari pimpinan dalam hal ini kepala dinas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa keterbatasan sistem informasi tidak berpengaruh pada akuntabilitas kinerja dan otoritas pengambilan keputusan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Pilcher, R. A., & Perrin, B. (2015). Implementing performance measurement systems: Indonesian local government under pressure. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 12, 3–33.
- Akbar, R., P. Robyn, and P. Brian. (2012). Performance Measurement in Indonesia: the case of local government. *Pacific Accounting Review*, 24: 262-291.
- Cavalluzzo, K. S., & Ittner, C. D. (2004). Implementing performance measurement innovations: Evidence from government. *Accounting, Organizations and Society*, 29(3–4), 243–267.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multi variate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahsun. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPF
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi.
- Mwita, J. I. (2000). Performance management model: A systems-based approach to public service quality. *International Journal of Public Sector Management*.
- Norman, F. (2010). Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bengkulu. *Jurnal SNA XIII. Purwokerto*.
- Nurkhamid, M. (2008). Implementasi inovasi sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 3(1), 45–76.
- Primarsanti, H., & Akbar, R. (2015). Factors influencing the success of performance measurement: Evidence from local government. *Journal of Indonesian Economy and Business: JIEB.*, 30(1), 56.
- Republik Indonesia. (1999). *Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2013). *Hubungan faktor internal institusi dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah*. University of Indonesia.
- Solikin, A. (2005). Accountability reporting in Indonesia: When self-serving attributions exaggerate perceived performance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 1(1).